

**MODUL P3PPKn SEKOLAH DASAR
(MATERI KONSEP DASAR PPKn MI/SD)
UNTUK MAHASISWA PGSD UAD**

Disusun Oleh

**Lisa Retnasari
Suyitno
Zulfan Hanif Rahman**

Pengembangan dan Praktik Pembelajaran PPKn SD

Kontributor

Lisa Retnasari

Suyitno

Zulfan Hanif Rahman

Editor

Lisa Retnasari

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya penyusunan modul pengembangan dan praktik pembelajaran PPKn SD dengan baik. Penyusunan modul ini disesuaikan dengan Kompetensi Capaian Pembelajaran dalam mata kuliah Pengembangan dan Praktik Pembelajaran PPKn SD.

Buku ini berisikan tentang materi konsep dasar PPKn di SD/MI yang membahas tentang hakekat dan tujuan PPKn, sejarah perkembangan PPKn di Indonesia, Paradigma baru Pkn hingga ruang lingkup PPKn di SD/MI. Modul ini memiliki tujuan untuk mempersiapkan calon guru sekolah dasar yang memiliki kompetensi pemahaman tentang konsep materi PPKn di sekolah dasar.

Semoga modul ini bermanfaat bagi mahasiswa. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas tersusunnya modul ini. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas modul ini.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
A. Definisi, Hakekat, dan Tujuan PPKn	5
1. Definisi PPKn menurut para ahli.....	5
2. Hakikat PPKn	5
3. Tujuan PPKn	5
B. Perkembangan Sejarah PKn di Indonesia	6
C. Paradigma Baru PPKn di Indonesia	8
D. PKn sebagai Disiplin Ilmu	11
E. Ruang Lingkup Kajian PPKn dalam Kurikulum MI/SD	12
Soal Evaluasi.....	15
Daftar Pustaka.....	16

A. Definisi, Hakekat, dan Tujuan PPKn

1. Definisi PPKn menurut para ahli:

a. (KEMENDIKBUD, 2016) Permendikbud. No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

b. Kerr

Pendidikan kewarganegaraan dirumuskan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warganegara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses penyiapan warganegara tersebut (Kerr, 1999:2).

c. J.J. Cogan

Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warganegara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakat. (Cogan, 1999:4).

2. Hakekat PPKn

Berbagai definisi tersebut dapat menjelaskan bahwa hakekat dari Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan secara khusus peran pendidikan termasuk didalamnya persekolahan, pengajaran dan pembelajaran, dalam proses penyiapan warga negara tersebut.

3. Tujuan PPKn

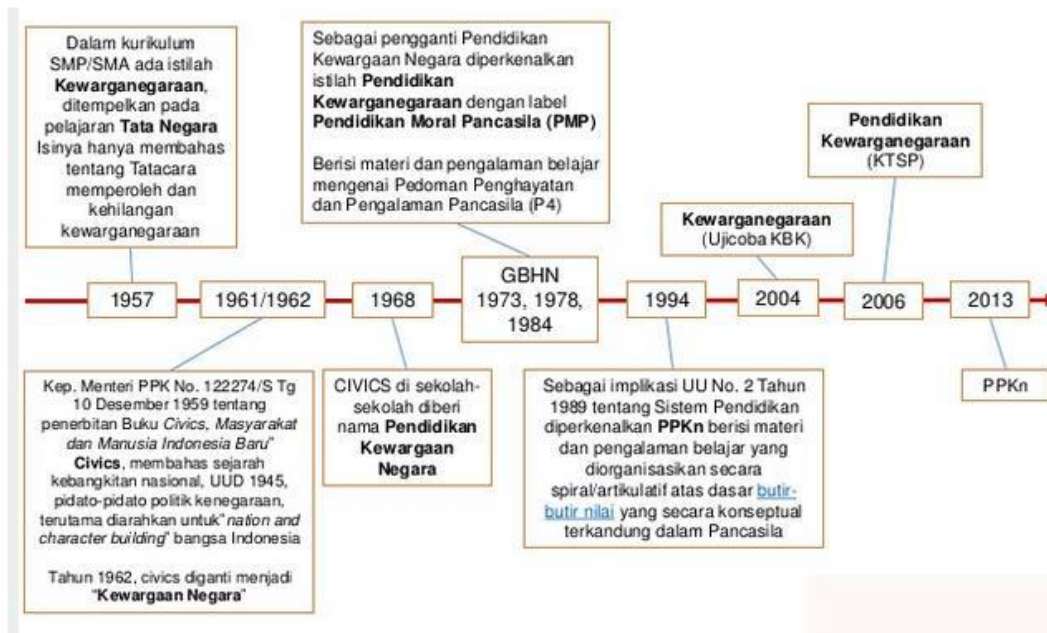
Tujuan dasar dari Pendidikan Kewarganegaraan yang berpusat pada guru dan siswa untuk mengajar dan belajar secara sistematis dan menyeluruh menjadi serangkaian konsep demokrasi, meliputi didefinisikan, dipraktikkan, dan dievaluasi (Patrick dan Vontz 2001: 41). Sehingga dapat dikatakan dasar dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadikan warga negara yang efektif yaitu warga negara yang bersifat cakap dan memiliki kepedulian (Mukhamad Murdiono, 2012: 47). Sedangkan, tujuan PKn pada KTSP (2006) yang dijelaskan dalam Permendikbud No. 22 tahun 2006:

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.

- a) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
- b) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi
- c) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
- d) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Permendikbud No. 22 tahun 2006).

B. Perkembangan Sejarah PKn di Indonesia

Mata pelajaran PKn di Indonesia dalam perkembangan sejarahnya mengalami perjalanan panjang dan tidak lepas dari pengaruh kekuasaan. Mulai dari awal kemerdekaan perkembangan mata pelajaran PKn dalam kurikulum nasional sering berganti nomenklatur (penamaan) serta kajian materi didalamnya. Hal ini memang tidak terlepas PKn kecenderungan sebagai alat penguasa dalam mengukuhkan kekuasaan. Pada era reformasi terjadi perubahan dalam Pendidikan kewarganegaraan, dan tidak lagi menjadi alat penguasa. Berikut rangkuman perjalanan perkembangan sejarah PKn di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga sekarang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1. Peta perkembangan Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Sementara itu, Fokus kurikulum PKn pada jenjang SD di Indonesia dari tahun 1947-2004 dapat di lihat pada tabel 1.

Kurikulum	Nomenklatur/ Penamaan PKn	Fokus
Rencana Pelajaran 1947	Didikan Budi Pekerti	Warga negara sejati dan pendidikan nilai dan Moral
Rencana pendidikan 1962	Pendidikan Kemasyarakatan	Patriot Pancasila dan Revolusi 1945
Kurikulum 1968	Pendidikan Kewarga Negaraan	Pancasilais
Kurikulum 1978	Pendidikan Modal Pancasila (PMP)	Manusia pembangunan yang berPancasila
Kurikulum 1984	Pendidikan Modal Pancasila	Manusia pembangunan yang berPancasila

	(PMP)	
Kurikulum 1994	PPKn	Manusia pembangunan yang berPancasila
Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004	PKn	Demokrasi
KTSP 2006	PKn	1. Persatuan dan kesatuan bangsa; 2. Norma, hukum, dan peraturan; 3. Hak asasi manusia; 4. Kebutuhan warga negara; 5. Konstitusi negara; 6. Kekuasaan dan politik; 7. Pancasila; 8. Globalisasi
Kurikulum 2013	PPKn	4 pilar kebangsaan (UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, Pancasila, NKRI)

Sumber : Kalidjernih, (2007: 3) dan Sunarso, (2010).

C. Paradigma Baru PPKn di Indonesia

Pada abad 21 pendidikan kewarganegaraan mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Ranah dan cangkupan materi bergeser tidak hanya pada konsepsi moral, nilai dan karakter namun mengarah pada bagaimana konsepsi membentuk warga negara menjadi warga negara yang memiliki karakter yang baik dan memiliki kemampuan, kecerdasan dan keterampilan sebagai seorang warga negara.

Paradigma baru PPKn adalah kerangka pikir yang dibangun sebagai landasan dalam mengembangkan dan memberi bentuk konseptual baru PKn. Paradigma berarti juga suatu model atau rancang-bangun pikiran yang digunakan dalam Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Maka dibutuhkan tujuan utama dari Kurikulum kewarganegaraan terdiri dari kompetensi dan kualitas dari warga yang kita butuhkan dalam masyarakat demokratis. Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan sikap harus ditawarkan terpadu dengan pelajaran lain yang relevan. Kurikulum kewarganegaraan harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai baik dalam dan keluar sekolah. Oleh karena itu, kurikulum di sekolah harus komprehensif dan terpadu dalam hubungan dengan komunitas, sekolah dan masyarakat (Doganay, 2012: 37). Berdasarkan pemeparan tersebut, misi PKn sekarang di Indonesia dengan paradigma barunya adalah mengembangkan pendidikan demokrasi yang secara psiko- pedagogis dan sosio-andragogis berfungsi mengembangkan tiga karakteristik pokok warga negara yang demokratis. Ketiga pokok karakter tersebut yakni; (1) pengetahuan warga negara (2) keterampilan warga negara, (3) disposisi warga negara. Selanjutnya, Patrick & Vontz (2001: 41) menjabarkan kompetensi pendidikan kewarganegaraan sebagai berikut.

1. Pengetahuan kewarganegaraan dan pemerintah dalam demokrasi (pengetahuan warga negara)
 - a. Konsep/prinsip mengenai substansi demokrasi
 - b. Isu tentang arti dan inti pelaksanaan ide-ide
 - c. Konstitusi dan lembaga-lembaga perwakilan pemerintahan demokrasi
 - d. Organisasi dan fungsi dari lembaga- lembaga demokratis
 - e. Praktik-praktik demokrasi kewarganegaraan dan peran warga
 - f. Konteks demokrasi: budaya, sosial, politik dan ekonomi
 - g. Sejarah di negara-negara tertentu dan di seluruh dunia
2. Keterampilan intelektual kewarganegaraan dalam demokrasi (keterampilan kognitif warga negara)
 - a. Mengidentifikasi dan menjelaskan fenomena (kejadian dan persoalan) politik,

- kehidupan warga negara
- b. Menganalisis dan menjelaskan fenomena (kejadian dan persoalan) kehidupan politik/bernegara
 - c. Mengevaluasi, mengambil, dan mempertahankan posisi pada isu-isu dan acara-acara publik Berpikir kritis tentang kondisi kehidupan politik/bernegara
 - d. Berpikir secara konstruktif tentang bagaimana memperbaiki kehidupan politik/sipil
3. Keterampilan partisipatori warga negara dalam demokrasi (keterampilan partisipatif warga negara)
- a. Interaksi warga negara dengan warga negara lain untuk kepentingan pribadi dan umum
 - b. Pemantauan acara-acara dan masalah publik
 - c. Membuat keputusan tentang isu-isu kebijakan publik
 - d. Melaksanakan keputusan umum, sebagai kebijakan publik
 - e. Mengambil tindakan untuk meningkatkan kehidupan politik/sipil
4. Watak warga negara dalam demokrasi (watak warga negara)
- f. Mempromosikan kesejahteraan umum.
 - g. Menegaskan kesamaan tentang kemanusiaan dan martabat setiap orang.
 - h. Menghormati, melindungi, dan menggunakan hak-hak yang dimiliki sama dengan setiap orang.
 - i. Berpartisipasi secara bertanggungjawab dalam kehidupan politik/sipil masyarakat.
 - j. Menghormati, melindungi, dan berlatih pemerintah dengan persetujuan dari orang-orang
 - k. Mendukung dan berlatih kebijakan sipil (Patrick & Vontz, 2001: 41).

Sementara itu, Doganay (2012: 31) menjabarkan berkaitan komponen-komponen dalam kompetensi kewarganegaraan seperti pada gambar berikut.

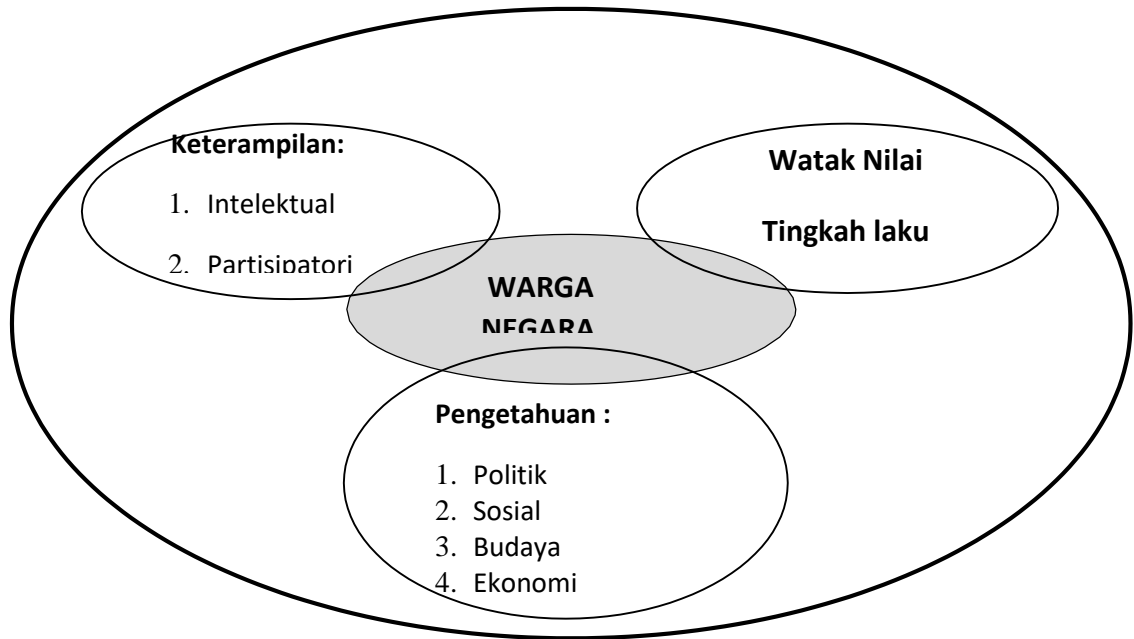


Diagram 1. Kategori Utama dari Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Demokratis. Sumber: Doganay (2012: 31)

D. PKn sebagai Disiplin Ilmu

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan disiplin ilmu yang membutuhkan kajian serta keseriusan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Secara instrumental dijabarkan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 37 dinyatakan bahwa: "...pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air". Yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan dalam Undang-Undang tersebut mencakup substansi dan proses pendidikan nilai ideologis Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pada pendidikan kewajiban dan hak warganegara.

Pemaparan UU tersebut mempertegas bahwa PKn sesuai dengan kode etik keilmuan. Kode tersebut telah mengandung pedoman, acuan, standar (nilai, norma, kaidah keilmuan) sikap dan perilaku yang dipandang layak, pantas, jujur, dan benar

serta diakui, dijunjung tinggi, disepakati oleh anggota keilmuan dalam setiap upaya, karya, dan ikhtiar keilmuan.

E. Ruang Lingkup Kajian PPKn dalam Kurikulum MI/SD

Dasar dari ruang lingkup kajian PPKn di Indonesia, dijabarkan dalam (Kemdikbud, 2016) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, ruang lingkup materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk MI/SD mulai dari kelas I-VI sebagai berikut:

1. Kandungan moral Pancasila dalam Lambang Negara.
2. Bentuk dan tujuan norma/kaidah dalam masyarakat.
3. Semangat kebersamaan dalam keberagaman.
4. Persatuan dan kesatuan bangsa
5. Makna simbol-simbol Pancasila dan lambang negara Indonesia.
6. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warganegara.
7. Makna keberagaman personal, sosial, dan kultural.
8. Moralitas sosial dan politik warga negara/ pejabat negara, dan tokoh masyarakat
9. Nilai dan moral Pancasila.
10. Keanekaragaman sosial dan budaya dan pentingnya kebersamaan.
11. Nilai dan moral persatuan dan kesatuan bangsa.
12. Moralitas terpuji dalam kehidupan sehari-hari

Sementara itu, Udin.S.Winataputra, (2012: 6) meramu ruang lingkup dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SD/MI pada kurikulum 2013, meliputi:

1. Pancasila, sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi nasional Indonesia serta etika dalam pergaulan Internasional.
2. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud komitmen keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang utuh dan kohesif secara nasional dan harmonis dalam pergaulan antarbangsa.
4. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bentuk final Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia.

Berkaca pada ruang lingkup di atas, paradigma Kurikulum 2013 yang saat ini memasuki tahap implemetasi meluas, keempat ruang lingkup materi tersebut diorganisasikan secara psikologis dan sosial kutural dengan menggunakan pendekatan logika substantif dan spiral lingkungan semakin meluas mulai dari kelas I SD sampai dengan kelas VI SD. Dengan menggunakan konsepsi adanya integrator kompetensi yang menjadi jembatan atau tangga mendukung/ *scaffolder* dalam mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yakni Kompetensi Inti (KI), dikembangkan Kompetensi Dasar (KD) yang tidak lain merupakan kompetensi bermuatan substansi mata pelajaran/mata kuliah.

Pengembangan ruang lingkup kajian PPKn di Indonesia telah menyesuaikan dengan karakteristik warganegara abad ke- 21. Cogan and Derricott, (1998:115) memaparkan bahwa karakteristik yang harus dimiliki warga negara abad 21 adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global.
- b. Kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat.
- c. Kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya.
- d. Kemampuan berpikir kritis dan sistematis.
- e. Memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia (seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dsb).
- f. Kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan.
- g. Kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan.

- h. Kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional, dan internasional.

SOAL EVALUASI

Nama :

NIM :

Kelas :

Jawablah soal di bawah ini dengan singkat dan jelas.

1. Berdasarkan analisis konseptual jelaskan hakikat, fungsi, tujuan, ruang lingkup dan karakteristik PPKn SD, menurut pendapat anda?
2. Menurut Saudara, apa pentingnya memahami konsep PPKn SD?
3. Jelaskan, paradigma baru PPKn SD yang sesuai dengan keterampilan abad 21, pendidikan karakter, dan sosial?

-Semangat Mengerjakan Tugas-

DAFTAR PUSTAKA

- Cogan, J.J. (1999). *Developing the civic society: the role of civic education*. Bandung: CISED.
- Cogan, John J. and Ray Derricott. (1998). *Citizenship education for the 21st century: setting the context*. London: Kogan Page.
- Doğanay, Ahmet. (2012). A curriculum framework for active democratic citizenship education.
- Kalidjernih, Freddy K. (2007). *Postcolonial citizenship education : a critical analysis of production and reproduction of the Indonesia civic ideal*; Cakrawala Baru Kewarganegaraan.
- Kerr, David. (1999). *Citizenship education: an international comparison*. England: National Foundation for Educational Research-NFER.
- Murdiono, Mukhamad. (2012). *Strategi pembelajaran kewarganegaraan : berbasis portofolio*. Yogyakarta: Ombak.
- Patrick, John J. and Thomas S. Vontz. (2001). *Components of education for democratic citizenship in the preparation of social studies teacher*. Dalam John J. Patrick dan Robert S. Leming (eds.). (2001).
- Permendikbud. No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
- Sunarso, dkk. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: UNYPRESS .
- Winataputra, Udin S. (2012). *Materi dan Pembelajaran PKn SD*. Jakarta : Universitas Terbuka.